

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Masyarakat, Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial earga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹

Kemakmuran masyarakat merupakan faktor penting bagi suatu bangsa untuk kemajuan bangsa ketika masyarakat makmur maka bangsa akan menjadi maju. Ini menjadi sebuah Pekerjaan Rumah bagi pemerintahan untuk mengurusinya, Banyak sekali faktor-faktor untuk memakmurkan masyarakat terutama dari bidang ekonomi yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi, dan saluran pembuangan dan gas. Termasuk pekerjaan umum seperti jalan kereta

¹[Kemsos.go.id/detail-peraturan/1/Undang-Undang.Republik-Indonesia.Nomor-11-Tahun-2009-Tentang-Kesejahteraan-Sosial](https://kemsos.go.id/detail-peraturan/1/Undang-Undang.Republik-Indonesia.Nomor-11-Tahun-2009-Tentang-Kesejahteraan-Sosial) . diakses pada 20 April 2021, pukul 00:00 WIB.

api, angkutan kota, dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Pembahasan infrastruktur cenderung mengarah dalam pembahasan barang publik.²

Namun ini bukan hal yang mudah, Pada saat pemerintah ingin meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karena sebelum melakukan hal tersebut pemerintah harus mempersiapkan modal awal dalam programnya, yaitu hal pertama yang harus dilakukan pemerintah dengan menyediakan pembangunan infrastruktur untuk menopang ekonomi masyarakat, agar masyarakat bisa mandiri dalam berekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan pemerintah yang paling utama adalah pembangunan jalan, pembangunan jalan tersebut bertujuan untuk kemudahan akses keluar masuk masyarakat dari desa ke kota untuk menjual hasil panen atau kebunnya ke kota. Selain itu masyarakat akan sendirinya membuka aktivitas perekonomian jika akses dari desa ke kota mudah.

Jika pembangunan infrastruktur di Indonesia dilakukan secara merata maka masyarakat mudah untuk berhubungan dengan kota dan

² Familioni, *"The Role of Economic and Social Infrastructure in Economic Development: A Global view (2004: 20)"*h.20

otomatis akan terjalinnya interaksi ekonomi yang baik antara pedesaan dengan perkotaan, khususnya daerah provinsi banten yang sangat luas.

Banten merupakan Provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dibidang pertanian perkebunan dan industri. Jika pemerintah mendukung untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan maka pemerintah harus menyediakan fasilitas infranstruktur yang menjamin pendistribusian sumber daya yang ada di daerahnya khususnya didaerah pedesaan.

Salah satu daerah banten yang memiliki wilayah daerah yang luas adalah kabupaten tangerang, ini menjadikan kesulitan untuk pembangunan desa yang merata khususnya di infrastruktur desa. Masih banyaknya ketidak merataanya pembangunan di pedesaan menjadi masalah terhambatnya perekonomian desa karena infrastrukturnya yang kurang menunjang.

Adanya Anggaran Desa dari pemerintah pusat yang bertujuan agar daerah desa bisa melakukan perencanaan pembangunan fisik ataupun non fisik untuk menopang perekonomian desa secara mandiri. Untuk mendorong hal tersebut maka dana desa harus dialokasikan kepada infrastruktur desa untuk menunjang aktivitas perekonomian

masyarakat desa dan mengembangkan perekonomian desa di Kabupaten Tangerang khususnya di daerah Balaraja.

Pada kecamatan Balaraja realisasi dana desa di beri penghargaan oleh pemerintah Provinsi Banten sebagai desa terbaik dalam realisasi dana desa pada tahun 2017, tepatnya berada di desa Tobat yang berada di sebelah barat Kecamatan Balaraja, desa tersebut memang sangat baik dalam menggunakan alokasi belanja desa, dimana pemerintah desa melakukan pembangunan yang tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat desa.

Contohnya pembangunan jalan gang dan tanggul sungai di desa tersebut merealisasikan anggaran dana desa sudah tepat sesuai kebijakan pemerintah pusat yang melakukan penyesuaian dan perencanaan kebutuhan pembangunan sesuai keadaan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan masyarakat sangat antusias dalam mengontrol dana desa dengan menayakan pada aparatur desa tentang pengalokasian dana desa. Dan ketika rancangan anggaran dana desa setiap tahunnya selalu didiskusikan bersama RT RW dan tokoh masyarakat.

Kecamatan balaraja merupakan daerah industri padat karya yang pembangunan infrastrukturnya sudah merata dan memadai, dilihat

dari adanya pembangunan jalan di setiap gang atau jalan sempit di perkampungan, adanya pembangunan saluran irigasi dan gorong-gorong yang merata dan pembangunan fasilitas public lainnya. Selain itu Salah satu desa yang ada di Kecamatan Balaraja mendapatkan penghargaan dari PemProv Banten sebagai desa terbaik dalam realisasi dana desa di Provinsi Banten pada tahun 2017.

Adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak sinkronnya antar kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah desa dikarenakan sebagianjn desa fasilitas infrastrukturnya sudah merata dan memadai akan tetapi ada kekurangan dibidan non infrastruktur seperti lembaga pendorong aktivitas ekonomi desa contohnya : Koperasi desa, BumDesa, PKK, dan pelatihan potensi desa.

Alasan tersebut menjadikan landasan penulis ingin meneliti pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di kecamatan Balaraja.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.

1. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.
2. Kurangnya pengalokasian Dana Desa digunakan pada kegiatan ekonomi seperti pembentukan umkm, koperasi, permodalan, BUMDes dan lainnya
3. Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dikerjakan oleh pihak ketiga.
4. Pembangunan infrastruktur bukan prioritas kebutuhan masyarakat desa di kecamatan Balaraja.
5. Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa.
6. Belanja di luar yang telah dianggarkan APBDesa.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara maksimal, Fokus dan mendalam maka penulis perlu membatasi penelitian ini pandangan permasalahan dengan variabelnya, Oleh karena itu, Penulis membatasi dirinya berkaitan dengan “Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang 2015-

2019". Pembangunan infrastruktur desa di pilih karena peningkatan pertumbuhan ekonomi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. Dan jika dana pengalokasiannya dilakukan dengan benar sesuai kebijakan yang telah di tetapkan maka akan tercapainya perekonomian masyarakat yang sejahtera.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas ,maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap tingkat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Balaraja pada tahap pertama?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sendiri memiliki tujuan yang secara umum dan khusus bagi penulis sendiri,secara umum penelitian ini berkaitan dengan perumusan masalah di atas bertujuan diantaranya sebagai berikut:

Menganalisi alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa di kecamatan Balaraja.

.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bertujuan untuk berbagai hal informasi antara lain :

1. Bagi penulis penelitian ini untuk menambah wawasan dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas yaitu tentang pengalokasian dana desa.
2. Bagi instansi penelitian ini memberikan edukasi dan informasi tentang pengalokasian dana desa untuk infrastruktur.
3. Bagi umum penelitian ini memeberikan informasi tentang pengalokasian dana desa terhadap infrastruktur desa dan memberikan gambaran peran dana desa yang seharusnya sesuai kebijakan pemerintah.

G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya pengalokasian dana desa merupakan kebijakan yang sangat baik untuk kesejahteraan desa, Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau hal tersebut menjadikan kesulitan pemerataan pembangunan desa tertinggal dan terpicil untuk mendapatkan fasilitas maupun pelayanan.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.³

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa sebagai stimulan, yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan – tujuan kebijakan dana desa yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pembangunan merupakan proses yang mencakup perubahan atas berbagai struktur sosial yang ada didalam masyarakat, menurut Siagian dalam Khairuddin Pembangunan merupakan rangkaian usaha

³ Kementrian Keuangan, *Buku Saku Desa*, (Jakarta:Kemenku.go.id,2017 diakses pada 1 Juni 2020, pukul 20:00 WIB.

yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan yang akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi Kajian Otonomi Daerah.⁴

Salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dianggap penting karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain⁵. Pembangunan infrastruktur dimulai dari tingkat paling rendah yaitu pada pembangunan infrastruktur desa. Koentjaraningrat mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat.⁶

⁴ Khairuddin. *Pembangunan Masyarakat* :Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi, Perencanaan, Yogyakarta : Liberty, 2000

⁵ Cakrawijaya, Dkk. 2014. *Jurnal Perencanaan Daerah dan Kota* 25 (2)

⁶ Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006

Sedangkan menurut P.H Landis terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, Dari definisi definisi di atas, dapat diartikan bahwa desa merupakan bentuk lingkup organisasi pemerintahan terkecil yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan nasional karena pedesaan merupakan bagian terbesar wilayah nasional.

Tabel.1.1

No	Nama / Judul Skripsi / PTN / Tahun	Subtansi	Persamaan Dan Perbedaan
1	Heri Wahyu Pinilih / 200 140 106 / yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (studi pada Desa-Desa	Berdasarkan pengujian secara bersama-sama atau simultan menunjukkan bahwa Variable PADES, DD, AADD dan BHPR berpengaruh signifikan terhadap belanja desa dibidang infrastruktur.	Persamaan : Sama – sama membahas dana desa untuk infrastruktur. Dan peneliti menggunakan metode anlasis kuantitatif, Perbedaan :

	Dikabupaten Wonogiri) / Universitas Muhammadiyah Suakarta / 2018		Penulis Membahas tentang Variabel PADES, DD, AADD dan BHPR Terhadap Belanja Bidang Infrastruktur,.Dan data yang digunakan adalah data sekunder, Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling.
2	Skripsi karya Rosipah / 6661092346 yang berjudul Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balaraja Kabupaten	Evaluasi alokasi Dana Desa Di kecamatan Belaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2012 berjalan dengan baik, yaitu dengan mencapai angka	Persamaan : Dalam penelitian tersebut menggubakan metode kuantitatif, Dan penelitian ini y

	<p>Tangerang(studi Kasus di Kecamatan Balaraja) / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten / 2014</p>	<p>62,66% dari hipotesis awal yang dibuat oleh peneliti yaitu minimal 65%..</p>	<p>meneleiti alokasi dana desa di kecamatan balaraja. Dan Peneliti mendapatkan data primer yaitu dengan metode penyebaran kuisioner diseluruh desa yang ada di kecamatan Balaraja.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penulis tersebut meneliti dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang sedangkan dalam penelitian saya yang diteliti adalah dana desa yang bersumber</p>
--	--	---	---

			dari APBN yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini mefokuskan pada evaluasi dana desa di kecamatan Balaraja tahun 2012
3.	Sholihatul Fitri / G71215026 / EfektifitasnPengeolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumlyorejo Kecamatan Dukun	Pengelolaan Dana Desa yang Ada di desa Madumlyorejo sudah berjalan dengan baik. Namun Pasrtisipasi masyarakat masih rendah krena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengeloaan Alokasi Dana	Persamaan : Penulis sama-sama meneliti tentang Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Desa Perbedaan : Penulis menggunakan Metode kualiatitatif dan Pengumpulan

	Kabupaten Gersik /Universitas Negeri Sunan Ampe / 2019	Desa dan sudah efektifnya Alokasi Dana Desa yang di gunakan untuk waawancara.Pembangunan Sudah sesuai aturan dan masyarakat desa sudah merasakannya.	data didapatkan dengan metode dan penelitan menggunakan teknik observasi langsung ke lapangan.
--	--	--	--

Pembangunan desa yang harus diperhatikan adalah dalam bidang infrastruktur fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat agar bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan infrastruktur fisik yang tidak memadai khususnya desa yang ada di daerah tertinggal dan terpencil yang masih banyak yang membutuhkan sentuhan pembangunan dari pemerintah.

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam sebuah penelitian perlu ada landasan penelitian terdahulu untuk menjadi sebuah acuan penulis menyusun penelitian berikut di bawah ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan pada judul penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan membagikan kedalam beberapa Bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Bab I : Yaitu meliputi dalam Bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, Identifikasi Masalah, Batasan masalah, perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, Hipotesis, Metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab II : Dalam Bab ini Berisikan tentang tinjauan Pustaka antara lain, Pengertian Desa, Pengertian dana desa, Pengertian alokasi dana desa, Pembangunan desa, Infrastruktur desa, Alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa.

Bab III : Yaitu dalam Bab ini Menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dan hipotesis penelitian.

Bab IV : Yaitu dalam bab ini berisi gambaran umum tentang objek Penelitian. Gamabran umum tentang karakteristik responden Analisis Data meliputi Analisis deskriptif statistic, model regresi, uji

asumsi klasik dan uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi (R^2)

Bab V : Yaitu dalam bab ini meliputi Penutup yang membahas kesimpulan dan saran.